

**BAB II**  
**TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1. Tinjauan Literatur**

**Tabel 2. 1 Tinjauan Literatur**

No	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1	Kerjasama Pertahanan Indonesia-Jerman Dalam Pengadaan Tank Leopard dan <i>Transfer of Technology</i> (ToT) Untuk Modernisasi Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) Tentara Nasional Indonesia (TNI) (2012-2017)	Mega Putri Andiani	Penelitian yang sama-sama membahas kerjasama pertahanan antara Indonesia dengan Jerman mengenai alutsista yang ada di Indonesia	Perbedaan terdapat pada fokus pembahasan dimana penelitian penulis fokus terhadap modernisasi alutsista di era SBY-Jokowi.
2	Analisis Kepentingan Jerman dalam Pengiriman <i>Main Battle Tank Leopard</i> ke Indonesia (2012-2017)	Valerie Ilhamna Putri	Penelitian yang sama-sama membahas kerjasama Indonesia-Jerman dalam pengadaan alutsista	Perbedaan terdapat pada fokus pembahasan dimana penelitian penulis fokus terhadap analisis modernisasi alutsista di era SBY-Jokowi

3	Penguatan Alutsista Sebagai Pilar Kekuatan Militer Indonesia	Gendut Hery Wibowo, Deny D.A.R dan Haposan Simatupang	Penelitian yang sama-sama membahas penguatan atau modernisasi alutsista	Perbedaan terdapat pada fokus pembahasan dimana penelitian penulis fokus terhadap modernisasi alutsista terkhususnya di era SBY-Jokowi
4	Kolaborasi Peran Diplomasi Politik Luar Negeri Indonesia Dengan Upaya Peningkatan Kompetensi Militer Indonesia	Evi Dwi Hastri dan R. Aj. Nindya Rizky Utamie	Memiliki persamaan di pembahasan mengenai peningkatan kompetensi militer Indonesia	Perbedaan terdapat pada fokus pembahasan dimana penelitian penulis fokus terhadap modernisasi alutsista terkhususnya di era SBY-Jokowi
5	Analisis <i>Political Commitment</i> Jokowi dalam Implementasikan “Revolusi Mental” dan “Nawa Cita” untuk menciptakan <i>power politic</i> di ASEAN.	Wilda Rasaili, Nur Inna Alfiyah, dan Ach. Andiriyanto	Memiliki persamaan di teori dan membahas mengenai perkembangan militer di era Jokowi	Penelitian yang penulis lakukan memiliki perbedaan dimana focus peneliti bukan pada <i>power politic</i> di ASEAN namun lebih kepada kekuatan militer di Indonesia

Dalam artikel pertama dengan judul *Kerjasama Pertahanan Indonesia-Jerman Dalam Pengadaan Tank Leopard dan Transfer of Technology (ToT) Untuk Modernisasi Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) Tentara*

*Nasional Indonesia (TNI)* (2012-2017) menunjang penelitian yang akan penulis lakukan, maka penulis juga melihat apakah telah ada penelitian lain yang melakukan penelitian yang sama. Artikel pertama membahas mengenai hubungan Kerjasama antar negara merupakan suatu inisiatif yang perlu dilakukan mengingat semakin kompleksnya kondisi dalam masyarakat dunia internasional, menciptakan ketergantungan yang saling terjalin antara negara-negara.

Hubungan internasional menjadi suatu dinamika yang melibatkan lintasan batas negara, memungkinkan aktor-aktor hubungan internasional untuk mengatasi pembatasan yang mungkin menjadi hambatan dalam menjalin interaksi". Bentuk hubungan yang melibatkan lintasan batas negara tersebut mencakup interaksi antar negara, baik dalam bentuk kerjasama maupun konflik. Anak Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochamad Yani menyatakan, "Hubungan Internasional adalah bentuk interaksi antara aktor atau anggota masyarakat yang satu dengan aktor yang lain yang melintasi batas negara. Terjadinya hubungan internasional diwajibkan oleh adanya saling ketergantungan dan meningkatnya kompleksitas kehidupan manusia dalam masyarakat internasional, sehingga prinsip interdependensi mencegah adanya negara yang terisolasi dari dunia luar. (Perwita & Yani, 2005).

Pola interaksi hubungan internasional tidak dapat dipisahkan dengan segala bentuk interaksi yang berlangsung dalam pergaulan masyarakat internasional, baik oleh para pelaku negara (*state-actor*) maupun oleh pelaku – pelaku bukan negara (*non-state actor*). Pola hubungan atau interaksi ini dapat juga berupa kerjasama (*cooperation*), persaingan (*competition*), dan pertentangan (*conflict*).

Robert Jackson dan George & Sorensen juga mengatakan, bahwa:

“Hubungan Internasional kontemporer selain mengkaji hubungan politik, juga mencakup sekelompok kajian lainnya seperti tentang interdependensi perekonomian, kesenjangan utara-selatan, keterbelakangan, perusahaan internasional, hak – hak asasi manusia, organisasi – organisasi dan Lembaga – Lembaga swadaya masyarakat (LSM) internasional, lingkungan hidup, gender, dan lain sebagainya” (Jackson & Sorensen, 2005).

Dari sejarah perkembangan studi hubungan internasional bersifat interdisipliner yaitu dimana hubungan internasional tidak apat dilepaskan dari aspek – aspek ilmu – ilmu sosial lain yang menjadi pembentuknya dengan sifat

keilmuannya yang saling timbal balik. Dari sejarah perkembangan hubungan internasional, secara umum dapat dinyatakan bahwa ilmu hubungan internasional lahir dengan tujuan untuk mencegah perang dan membangun perdamaian. Sehingga secara serius terdapat upaya – upaya untuk memunculkan ilmu yang benar – benar mandiri (Darmayadi et al., 2015).

Dalam artikel kedua mengenai *Analisis Kepentingan Jerman dalam Pengiriman Main Battle Tank Leopard ke Indonesia* (2012-2017) dibahas mengenai alasan di balik pengiriman *Main Battle Tank* (MBT) Leopard milik Jerman ke Indonesia dari tahun 2012 hingga tahun 2017. Transfer senjata dilakukan dengan tujuan untuk menambah kekayaan, kekuatan dan menghasilkan inovasi dalam produksi kekuatan militer suatu negara. Transfer senjata merupakan bagian esensial dari struktur keamanan internasional karena dapat mempengaruhi pergeseran kekuatan lokal dan regional. Artikel ini berargumentasi adanya tiga dimensi kekuatan bersamaan dengan pengaruh yang dituju dalam melakukan transfer senjata oleh negara penyuplai. Dimensi-dimensi kekuatan yang dituju adalah kekuatan penawaran (*bargaining power*), kekuatan struktural (*structural power*), dan kekuatan hegemoni (*hegemonic power*). Pada akhir artikel disimpulkan bahwa ketiga dimensi tersebut saling melengkapi dan berhubungan untuk mencapai kepentingan negara penyuplai persenjataan (Putri, 2021).

Literatur ketiga yang membahas penguatan kekuatan alutsista adalah artikel jurnal tahun 2022 yang berjudul *Penguatan Alutsista Sebagai Pilar Kekuatan Militer Indonesia* (Wibowo et al., 2022). Jurnal ini mengulas tentang kekuatan militer Indonesia, fokus pada beberapa aspek yang memperlihatkan elemen peralatan militer yang dapat diperkuat melalui peningkatan baik dari segi jumlah maupun kualitas, bertujuan untuk memperkuat kemampuan militer Indonesia dalam menghadapi berbagai ancaman pertahanan negara, terutama dalam konteks kemungkinan konflik. Artikel jurnal ini awalnya membahas bahwa kekuatan militer suatu negara dapat diukur melalui 8 unsur pembentuk yang terdiri dari 47 komponen yang saling terkait. Menurut *Global Fire Power* pada awal tahun 2021 (data diperbarui hingga Maret 2021), Indonesia ditempatkan pada peringkat ke-16 dunia dalam hal kekuatan militer. Ada potensi untuk meningkatkan kekuatan alutsista Indonesia baik dari segi kuantitas maupun kualitas, yang tercermin dari

perkembangan produsen alutsista seperti PT Dirgantara Indonesia, PT Pindad, dan PT PAL Indonesia seiring berjalannya waktu. (Wibowo et al., 2022).

Dalam mengevaluasi kekuatan militer suatu negara, *Global Fire Power* menggunakan sekitar 47 indikator yang berdasarkan pada 8 unsur pembentuk, termasuk Sumber Daya Manusia, Kekuatan Udara, Kekuatan Darat, Kekuatan Laut, Sumber Daya Alam, Logistik, Kekuatan Keuangan, dan Kekuatan Geografi. Pada tahun 2021, *Global Fire Power* menempatkan kekuatan militer Indonesia di peringkat ke-16 dunia, menjadikannya yang terbesar di Asia Tenggara.

Dalam kesimpulan penulisan ini, diungkapkan bahwa meskipun Indonesia memiliki kekuatan militer terkemuka di Asia Tenggara, potensi ancaman dapat berasal dari luar kawasan tersebut. Selain itu, adanya kelemahan pada berbagai unsur kekuatan militer Indonesia juga diidentifikasi sebagai potensi ancaman terhadap pertahanan negara.

Penelitian yang penulis lakukan membahas mengenai kerjasama Indonesia dengan Jerman untuk modernisasi alutsista oleh karena itu penulis juga akan menggunakan salah satu jurnal yang membahas hal tersebut dalam melakukan penelitiannya sebagai salah satu pembanding dalam sub bab ini. Salah satu penelitian yang membahas mengenai ini adalah adalah literatur ke empat dengan judul ***Kolaborasi Peran Diplomasi Politik Luar Negeri Indonesia Dengan Upaya Peningkatan Kompetensi Militer Indonesia*** (Hastri & Utamie, 2022). Dalam tulisan ini dibahas mengenai diplomasi yang dikenal dengan seni atau praktek dalam hal bernegosiasi yang dilakukan oleh seorang diplomat sebagai wakil sebuah negara atau organisasi. Diplomasi ini langsung berkaitan dengan diplomasi internasional yang mengurus beberapa hal seperti budaya, ekonomi, dan perdagangan. Dalam rangka modernisasi alat utama sistem persenjataan (Alutsista), Indonesia telah menjalin kerjasama strategis dengan berbagai negara mitra, salah satunya Jerman. Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini berfokus pada analisis kerjasama antara Indonesia dan Jerman dalam upaya memperkuat kekuatan militer Indonesia melalui modernisasi Alutsista. Salah satu sumber referensi yang digunakan dalam penelitian ini adalah artikel jurnal berjudul "Kolaborasi Peran Diplomasi Politik Luar Negeri Indonesia Dengan Upaya Peningkatan Kompetensi Militer Indonesia" (Hastri & Utamie, 2022).

Dalam penelitian tersebut, Hastri dan Utamie (2022) membahas peran diplomasi politik luar negeri Indonesia dalam meningkatkan kompetensi militer Indonesia. Diplomasi ini melibatkan berbagai aspek, termasuk budaya, ekonomi, dan perdagangan. Meskipun tidak secara khusus berkaitan dengan kerjasama Indonesia-Jerman dalam modernisasi Alutsista, penelitian ini memberikan pemahaman yang penting tentang bagaimana diplomasi politik luar negeri dapat berkontribusi pada peningkatan kompetensi militer suatu negara.

Namun, perlu diperhatikan bahwa perbedaan mendasar antara penelitian ini dan penelitian Hastri dan Utamie adalah fokusnya. Penelitian penulis berfokus pada modernisasi Alutsista Indonesia, khususnya di era pemerintahan SBY-Jokowi, sementara penelitian Hastri dan Utamie lebih bersifat umum dalam pembahasan peningkatan kompetensi militer Indonesia (Hastri & Utamie, 2022). Ini menunjukkan bahwa modernisasi Alutsista Indonesia memiliki tantangan dan dinamika sendiri yang perlu dipahami dan dianalisis secara mendalam. Dengan itu, Kerjasama Indonesia dengan Jerman dalam modernisasi Alutsista merupakan bagian penting dari upaya peningkatan kompetensi militer Indonesia, yang dapat diinformasikan oleh prinsip-prinsip diplomasi politik luar negeri yang dibahas dalam penelitian (Hastri & Utamie, 2022).

Jurnal lain yang membahas penelitian mengenai kerjasama internasional adalah literatur ke enam dengan judul **Analisis *Political Commitment* Jokowi dalam Implementasikan “Revolusi Mental” dan “Nawa Cita” untuk menciptakan *power politic* di ASEAN.** Dalam jurnal ini dijelaskan mengenai Dimasa pemerintahan Jokowi sebagai presiden RI ke-6, bangsa Indonesia berpotensi untuk menjadi bangsa yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong. Setiap pemerintahan selayaknya memang memiliki ide dan gagasan besar pembaharuan bangsa menuju lebih baik. Dalam penelitian ini, dapat mengeksplorasi isu-isu penting yang berkaitan dengan kerjasama internasional Indonesia dan bagaimana hal itu dapat memengaruhi kekuatan militer negara ini. Salah satu referensi yang relevan untuk penelitian ini adalah artikel jurnal yang berjudul "Analisis *Political Commitment* Jokowi dalam Implementasikan 'Revolusi Mental' dan 'Nawa Cita' untuk menciptakan power

politic di ASEAN" yang ditulis oleh Wilda Rasaili, Nur Inna Alfiyah, dan Ach. Andiriyanto.

Dalam artikel jurnal tersebut, Wilda Rasaili, Nur Inna Alfiyah, dan Ach. Andiriyanto membahas tentang upaya Jokowi sebagai Presiden Indonesia ke-6 dalam mengimplementasikan konsep "Revolusi Mental" dan "Nawa Cita" dengan tujuan menciptakan kekuatan politik Indonesia di ASEAN. Mereka menyoroti potensi Indonesia untuk menjadi bangsa yang berdaulat dan mandiri, berdasarkan nilai-nilai gotong-royong. Ini mencerminkan aspirasi setiap pemerintahan untuk memberikan kontribusi kepada pembaharuan bangsa. Terdapat persamaan dalam teori-teori yang digunakan dalam kedua penelitian, dengan melihat kekuatan militer suatu negara adalah aspek penting dalam mendukung peran internasionalnya. Oleh karena itu, ini memberikan gambaran dari eksplorasi aspek power politik di ASEAN.

## **2.2 Kerangka Teoritis/konseptual**

### **2.2.1 Teori Neoralisme**

Teori Neorealisme, juga dikenal sebagai Teori Realisme Struktural atau Neorealisme Kenneth Waltz, adalah salah satu teori dalam studi hubungan internasional yang berfokus pada aspek-aspek sistemik dalam hubungan antarnegara (Jackson & Sorensen, 2005). Teori ini mengemukakan bahwa perilaku negara-negara dalam arena internasional didasarkan pada struktur sistem internasional itu sendiri, bukan pada karakteristik individu pemimpin atau negara. Teori ini menekankan peran faktor sistemik, seperti distribusi kekuatan antara negara-negara dan struktur sistem internasional dalam membentuk keputusan dan tindakan negara-negara. Hal ini penting karena membantu kita memahami dinamika geopolitik global, menjelaskan ketegangan antarnegara besar, dan menganalisis stabilitas sistem internasional. Terkait dengan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, Teori Neorealisme dapat diterapkan untuk memahami distribusi kekuatan dalam kerja sama global terkait perubahan iklim, kompetisi untuk sumber daya alam, dan kerja sama regional serta internasional dalam konteks lingkungan global yang terus berubah (Holsti, 1995). Indikator atau operasionalisasi dari Teori Neorealisme dapat mencakup beberapa elemen (Holsti, 1995) seperti:

1. Distribusi Kekuatan

Neorealisme mengacu pada distribusi kekuatan antara negara-negara sebagai salah satu indikator utama. Distribusi ini dapat diukur berdasarkan kapabilitas militer, ekonomi, atau pengaruh politik suatu negara dalam sistem internasional.

2. Sistem Internasional

Neorealisme mempertimbangkan berbagai jenis sistem internasional, seperti sistem bipolar (dua kekuatan utama), multipolar (banyak kekuatan utama), atau unipolar (satu kekuatan utama). Indikator ini akan mencoba mengidentifikasi struktur sistem internasional saat ini.

3. Perilaku Negara

Neorealisme memprediksi bahwa negara-negara akan berusaha memaksimalkan keamanan nasional mereka. Oleh karena itu, indikator perilaku negara dapat mencakup upaya untuk meningkatkan kekuatan militer, mencari aliansi strategis, atau mengambil langkah-langkah untuk menjaga stabilitas dalam sistem.

4. Ketegangan Antar-Negara

Dalam konteks Neorealisme, ketegangan dan konflik antara negara-negara besar atau kekuatan utama adalah indikator penting. Ketegangan ini bisa melibatkan rivalitas geopolitik, kompetisi ekonomi, atau persaingan keamanan.

5. Kerja Sama dan Konflik

Indikator lain mencakup tingkat kerja sama atau konflik antara negara-negara, terutama dalam konteks perjanjian internasional, negosiasi, atau konfrontasi langsung.

Teori Neorealisme dapat memberikan wawasan tentang faktor-faktor sistemik yang memengaruhi keputusan kedua negara dalam kerjasama pertahanan penelitian ini. Distribusi kekuatan menjadi elemen kunci dalam analisis ini. Neorealisme menekankan bahwa negara-negara akan berusaha memaksimalkan keamanan nasional mereka (Perwita & Yani, 2005). Dalam hal ini, Indonesia mungkin melihat perlunya memodernisasi alutsista sebagai respons terhadap pergeseran distribusi kekuatan di kawasan Asia Tenggara. Kebijakan ini juga dapat

dilihat sebagai upaya untuk menjaga posisi Indonesia dalam sistem internasional yang semakin kompleks.

Struktur sistem internasional menjadi penting. Neorealisme mengakui adanya sistem multipolar di mana beberapa negara memiliki kekuatan besar (Perwita & Yani, 2005). Jerman dan Indonesia, sebagai negara dengan pengaruh regional yang signifikan, mungkin melihat kerjasama pertahanan sebagai cara untuk meningkatkan posisi mereka dalam sistem internasional yang semakin kompleks dan kompetitif.

Dalam kesimpulan, pendekatan Neorealisme dapat memberikan landasan teoritis yang kuat untuk menganalisis kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Jerman dalam pengadaan senjata militer sebagai bagian dari modernisasi alutsista. Dengan fokus pada distribusi kekuatan, struktur sistem internasional, perilaku negara, ketegangan antara negara, dan tingkat kerja sama atau konflik, analisis ini membantu memahami dinamika kerjasama pertahanan di tengah perubahan lingkungan keamanan global.

### **2.2.2 Teori Kerja sama Internasional**

Sejak awal, teori hubungan internasional berfokus pada studi penyebab dan kondisi yang dapat menciptakan kerjasama. Kerjasama muncul sebagai hasil dari penyesuaian perilaku aktor-aktor dalam merespon atau mengantisipasi keputusan-keputusan yang diambil oleh aktor-aktor lain. Proses kerjasama bisa terwujud melalui perundingan yang dilakukan secara langsung, atau karena saling pengertian di antara pihak-pihak yang terlibat, sehingga perundingan tidak lagi menjadi suatu keharusan. (Dougherty & Pfaltzgraff, 1996).

Kerjasama dapat diartikan sebagai serangkaian relasi yang tidak melibatkan kekerasan atau tindakan paksaan dan diakui secara hukum, seperti yang terjadi dalam kerangka organisasi internasional seperti PBB atau Uni Eropa. Negara-negara bekerja sama melalui organisasi internasional dan rezim internasional, yang merujuk pada seperangkat aturan, regulasi, norma, dan prosedur pengambilan keputusan yang disepakati. Dalam kerangka hubungan internasional, organisasi dan rezim ini menjadi tempat di mana harapan serta kepentingan negara-negara saling berinteraksi. (Dougherty & Pfaltzgraff, 1996).

Kerjasama dapat berkembang dari komitmen individu terhadap kesejahteraan bersama atau sebagai upaya untuk memenuhi kepentingan pribadi. Kunci perilaku kerjasama terletak pada sejauh mana setiap individu percaya bahwa yang lainnya akan ikut bekerja sama. Oleh karena itu, isu utama dalam teori kerjasama berpusat pada pencapaian kepentingan pribadi, di mana hasil yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak lebih mungkin tercapai melalui kerja sama daripada usaha sendiri atau persaingan. (Dougherty & Pfaltzgraff, 1996)

Ada beberapa alasan mengapa negara melakukan kerjasama dengan negara melakukan kerjasama dengan negara lainnya:

- a. Dengan alasan demi meningkatkan kesejahteraan ekonominya banyak negara yang melakukan kerjasama dengan negara lainnya untuk mengurangi biaya yang harus ditanggung negara tersebut dalam memproduksi suatu produk kebutuhan bagi rakyatnya karena adanya keterbatasan yang dimiliki negara tersebut.
- b. Untuk meningkatkan efisiensi yang berkaitan dengan pengurangan biaya.
- c. Karena adanya masalah-masalah yang mengancam keamanan bersama.
- d. Dalam rangka mengurangi kerugian negatif yang diakibatkan oleh tindakan-tindakan individual negara yang memberi dampak terhadap negara lain (Holsti, 1995).

Suatu kerjasama internasional didorong oleh beberapa faktor:

- a. Kemajuan dibidang teknologi yang menyebabkan semakin mudahnya hubungan yang dapat dilakukan negara sehingga meningkatkan ketergantungan satu dengan yang lainnya.
- b. Kemajuan dan perkembangan ekonomi mempengaruhi kesejahteraan bangsa dan negara. Kesejahteraan suatu negara dapat mempengaruhi kesejahteraan bangsa-bangsa.
- c. Perubahan sifat peperangan dimana terdapat suatu keinginan bersama untuk saling melindungi dan membela diri dalam bentuk kerjasama internasional.
- d. Adanya kesadaran dan keinginan untuk bernegosiasi, salah satu metode kerjasama internasional yang dilandasi atas dasar bahwa dengan bernegosiasi akan memudahkan dalam pemecahan masalah yang dihadapi (Kartasmita, 1997).

Kerjasama internasional merupakan interaksi antarnegara yang bertujuan berdasarkan kepentingan nasional. Kerjasama internasional melibatkan seperangkat aturan, prinsip, norma, dan prosedur pengambilan keputusan yang mengatur operasional rezim internasional. Selain itu, negara-negara yang terlibat dalam kerjasama internasional memiliki kesamaan tujuan atau kepentingan bersama, karena tanpa kesamaan kepentingan, kerjasama tersebut menjadi tidak mungkin. Menurut K.J Holsti, kerjasama awalnya timbul karena munculnya berbagai masalah di tingkat nasional, regional, maupun global yang memerlukan perhatian lebih dari satu negara. Setiap negara kemudian mengusulkan solusi untuk menangani masalah tersebut, melakukan negosiasi atau tawar-menawar, melibatkan perundingan, mengumpulkan bukti-bukti untuk mendukung usulan tertentu, dan akhirnya menghasilkan suatu perjanjian yang memuaskan semua pihak. (Holsti, 1995).

Kerjasama antara Indonesia-Jerman mencerminkan kedua bangsa yang memiliki kepentingan masing-masing dalam bidang kemiliteran sehingga dalam hal ini membutuhkan melakukan kerjasama. Tentu di dalam melakukan kerjasama internasional terdapat banyak aturan dan kesepakatan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak.

Kerjasama pertahanan antara negara-negara merupakan fenomena yang penting dalam hubungan internasional. Teori kerjasama internasional memfokuskan pada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kerjasama antara negara-negara. Dalam konteks modernisasi alat utama sistem pertahanan (alutsista), teori ini memberikan landasan analisis yang kokoh. Penggunaan teori ini memungkinkan peneliti untuk memahami faktor-faktor politik, ekonomi, dan keamanan yang mempengaruhi kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Jerman selama tahun 2012 - 2020.

Selain itu, teori kerjasama internasional juga memberikan perspektif yang relevan dalam mempelajari mekanisme kerjasama pertahanan bilateral. Konsep-konsep seperti kepentingan bersama, kepercayaan, ketergantungan, dan tanggung jawab bersama yang diajukan oleh teori ini memperhatikan faktor-faktor penting dalam hubungan bilateral pertahanan. Dalam penelitian ini, teori kerjasama internasional dapat digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang

mempengaruhi kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Jerman dalam konteks modernisasi alutsista.

Teori kerjasama internasional dalam penelitian ini memiliki keterkaitan yang kuat dan alasan yang relevan. Teori ini memberikan kerangka kerja yang relevan, memungkinkan analisis dinamika kerjasama pertahanan, dan memberikan landasan teoretis yang kokoh bagi penelitian ini. Dengan demikian, penggunaan teori kerjasama internasional akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kerjasama pertahanan Indonesia dan Jerman dalam konteks modernisasi alutsista tahun 2012 - 2022.

### **2.2.3 Modernisasi Militer**

Modernisasi militer adalah upaya yang dilakukan oleh suatu negara atau organisasi militer untuk meningkatkan dan memodernisasi peralatan, teknologi, strategi, dan kemampuan militernya agar sesuai dengan tuntutan zaman yang lebih mutakhir (Hamilton & Langhorne, 1995). Tujuan dari modernisasi militer adalah untuk memperkuat pertahanan negara, menjaga keamanan nasional, dan menghadapi ancaman militer dengan cara yang lebih efektif (Ure, 1994). Modernisasi militer dapat mencakup berbagai aspek, seperti (Iskandar, 2014):

1. Peralatan dan Teknologi  
Peningkatan dan pembaruan peralatan militer, termasuk senjata, kendaraan tempur, pesawat, kapal, dan komunikasi yang lebih canggih.
2. Pelatihan dan Kepemimpinan  
Peningkatan pelatihan militer, keterampilan personel, dan manajemen serta kepemimpinan yang lebih efektif dalam organisasi militer.
3. Strategi dan Doktrin  
Penyusunan kembali strategi militer dan doktrin yang lebih sesuai dengan perubahan lingkungan strategis dan ancaman yang ada.
4. Logistik dan Infrastruktur  
Peningkatan dalam logistik, infrastruktur, dan kemampuan untuk merespons secara cepat dalam situasi darurat.
5. Riset dan Pengembangan  
Investasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi militer baru yang dapat memberikan keunggulan kompetitif.

Modernisasi militer dapat muncul sebagai tanggapan terhadap perkembangan geopolitik, ancaman keamanan yang baru, atau keinginan untuk memperkuat kemampuan militer suatu negara. Hal ini juga dapat berdampak pada keseimbangan kekuatan internasional dan dapat menjadi faktor yang mempengaruhi stabilitas global.

Modernisasi militer juga memainkan peran yang penting dalam hubungan internasional Indonesia. Modernisasi militer, melalui kerjasama bilateral dan regional, memungkinkan Indonesia untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan pertahanan nasionalnya (Arifin et al., 2008). Negara ini sering menjalin kerjasama dengan mitra internasional dalam pengadaan teknologi militer terkini, peralatan pertahanan, dan bahkan proyek pertahanan bersama.

Modernisasi militer tidak hanya mencakup peralatan militer dan teknologi, tetapi juga melibatkan pelatihan, latihan militer bersama, dan pertukaran intelijen. Ini memungkinkan Indonesia untuk meningkatkan kemampuan pertahanan nasional dan bersiap menghadapi tantangan keamanan yang mungkin timbul. Oleh karena itu, modernisasi militer dan kerjasama bilateral dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi dan pertahanan, menjadi dua elemen penting yang saling mendukung dalam upaya menjalin hubungan yang lebih kuat di tingkat internasional (Iskandar, 2014).

Modernisasi militer dan kerjasama bilateral memiliki hubungan yang erat dalam dinamika hubungan internasional. Banyak negara menjalin kerjasama bilateral untuk meningkatkan kemampuan pertahanan mereka melalui modernisasi militer. Ini seringkali melibatkan pembelian peralatan militer, pertukaran teknologi pertahanan, dan pelaksanaan latihan militer bersama (Rana, 2000). Kerjasama semacam ini memungkinkan negara-negara untuk mengakses teknologi militer terbaru dan memperkuat kemampuan pertahanan mereka dalam menghadapi ancaman regional atau global.

Selain itu, modernisasi militer melalui kerjasama bilateral juga dapat mencakup pengembangan proyek pertahanan bersama (Ure, 1994). Misalnya, negara-negara dapat berkolaborasi dalam merancang dan memproduksi pesawat tempur atau sistem pertahanan rudal. Hal ini memungkinkan mereka untuk

menggabungkan sumber daya dan teknologi guna mencapai tingkat modernisasi militer yang lebih tinggi dan efisien.

Terlebih lagi, modernisasi militer dapat menjadi aspek penting dari strategi keamanan bersama antara dua negara. Hal ini mungkin melibatkan kesepakatan pertahanan mutual atau kerjasama dalam menghadapi ancaman bersama, seperti terorisme atau kejahatan transnasional (Kurbalija, 1999) Dengan demikian, modernisasi militer dan kerjasama bilateral tidak hanya memperkuat kemampuan pertahanan suatu negara, tetapi juga memperkuat hubungan diplomatik dan keamanan dengan mitra bilateralnya.

#### **2.2.4 Kerjasama Bilateral**

Kerjasama Bilateral berawal dari adanya hubungan internasional untuk melakukan kerjasama Internasional antar negara demi kepentingan negara untuk meningkatkan beberapa sektor yang tidak dapat dipenuhi oleh negara sendiri (Eban & Abba, 1988). Pemahaman Kerjasama Bilateral berbeda dengan Kerjasama Internasional. Kerjasama bilateral adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau negara yang berlangsung secara langsung satu sama lain. Ini melibatkan dua negara atau pihak yang berusaha untuk mencapai tujuan bersama atau menyelesaikan masalah tertentu melalui perjanjian atau kesepakatan yang berlaku hanya untuk kedua pihak tersebut (Hocking, 1999). Menurut (Barston, 1997) indikator atau operasionalisasi dari kerjasama bilateral dapat mencakup:

##### **1. Perjanjian Bilateral**

Penandatanganan perjanjian resmi antara dua negara menandai komitmen kuat untuk menjalin kerja sama dalam berbagai bidang, seperti perdagangan, keamanan, atau lingkungan. Perjanjian tersebut mengikat kedua negara untuk saling mendukung dan bekerja bersama demi mencapai tujuan bersama yang menguntungkan kedua belah pihak.

##### **2. Diplomasi Bilateral**

Dalam konteks diplomasi bilateral, pertukaran diplomatik menjadi sarana penting untuk membangun hubungan yang lebih baik antara dua negara. Proses ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah untuk menjalin komunikasi formal, tetapi juga sebagai alat untuk memecahkan konflik, mempromosikan pemahaman saling, dan menciptakan kesempatan kerjasama yang lebih erat.

Diplomasi bilateral mencakup sejumlah aspek, termasuk bidang politik, ekonomi, dan sosial. Melalui dialog terbuka dan konstruktif antara diplomat-diplomat kedua negara, peluang untuk meningkatkan stabilitas politik, memperkuat kerjasama ekonomi, serta mengatasi tantangan lingkungan bersama dapat dijajaki.

### 3. Proyek Bersama

Kerjasama dalam proyek bersama antara dua negara menjadi landasan penting dalam membangun kemitraan yang kuat dan saling menguntungkan. Proyek-proyek ini melibatkan investasi atau dukungan dari kedua belah pihak, seringkali dalam skala besar, dengan fokus pada sektor-sektor strategis seperti infrastruktur atau penelitian bersama.

Proyek infrastruktur bersama mencakup pembangunan dan pengembangan berbagai fasilitas yang dapat meningkatkan konektivitas antara kedua negara. Ini melibatkan pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, atau proyek transportasi lainnya yang dapat mempercepat pertukaran barang dan meningkatkan efisiensi logistik. Investasi bersama dalam infrastruktur tidak hanya menguntungkan pertumbuhan ekonomi kedua negara, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan mendorong integrasi ekonomi yang lebih erat.

Selain itu, proyek penelitian bersama memungkinkan kedua negara untuk berkolaborasi dalam penemuan ilmiah, teknologi, atau inovasi tertentu. Ini bisa melibatkan penelitian di bidang kesehatan, energi terbarukan, ilmu pengetahuan, atau teknologi informasi. Melalui pertukaran pengetahuan dan sumber daya, proyek penelitian bersama memperkuat kapasitas riset kedua negara dan menciptakan terobosan yang dapat memberikan dampak positif dalam skala global.

### 4. Pertemuan dan Dialog

Pertemuan reguler antara pejabat pemerintah kedua negara merupakan forum penting yang dirancang untuk membahas isu-isu krusial dan mencari solusi bersama demi kepentingan bersama. Dalam konteks ini, pertemuan tersebut menjadi ajang yang memungkinkan para pejabat tinggi pemerintah dari kedua negara untuk secara langsung berinteraksi, berkomunikasi, dan

menyampaikan pandangan terkait dengan berbagai masalah yang memerlukan perhatian.

Pertemuan semacam ini mencakup beragam topik, termasuk kebijakan luar negeri, keamanan, ekonomi, dan isu-isu lingkungan. Pejabat pemerintah berdiskusi untuk memahami perspektif masing-masing negara dan mencari titik temu yang memungkinkan untuk kerja sama lebih lanjut. Diskusi ini juga dapat mencakup perkembangan terkini di tingkat internasional yang dapat memengaruhi kedua negara.

Selain itu, pertemuan reguler ini memberikan kesempatan bagi para pejabat untuk membahas proyek-proyek bersama, kebijakan investasi, serta kerja sama dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan budaya. Pada level ini, kesepakatan konkret dapat dirumuskan, dan strategi bersama dapat diimplementasikan untuk mencapai tujuan bersama.

Pentingnya pertemuan reguler antara pejabat pemerintah juga terletak pada kemampuannya untuk membangun kepercayaan dan memperkuat hubungan antar negara. Melalui dialog langsung dan saling memahami, para pemimpin dapat meminimalkan ketidaksetujuan, menciptakan kejelasan, dan membentuk kerangka kerja yang kuat untuk menjaga stabilitas dan perkembangan positif hubungan bilateral.

Dengan demikian, pertemuan rutin antara pejabat pemerintah kedua negara bukan hanya sekadar bentuk diplomasi, tetapi juga merupakan langkah konkret menuju kerjasama yang lebih erat, pemecahan masalah bersama, dan penguatan hubungan bilateral secara keseluruhan.

##### 5. Pertukaran Budaya dan Pendidikan

Program pertukaran pelajar, seniman, atau ahli budaya merupakan inisiatif yang bermakna untuk mempererat hubungan antara dua negara sambil meningkatkan pemahaman lintas budaya. Program semacam ini menjadi sarana penting dalam mempromosikan kerja sama dan toleransi antarbangsa, sekaligus memberikan peluang bagi individu untuk merasakan dan memahami lebih dalam kekayaan budaya satu sama lain.

Pertukaran pelajar adalah aspek penting dari program ini, di mana mahasiswa memiliki kesempatan untuk belajar dan menggali pengalaman

akademis di lingkungan pendidikan yang berbeda. Ini tidak hanya meningkatkan kualitas pendidikan mereka tetapi juga memungkinkan terbentuknya jaringan pertemanan lintas batas yang dapat berdampak positif pada hubungan bilateral di masa depan.

Selain itu, pertukaran seniman memberikan kesempatan bagi para seniman untuk terlibat dalam lingkungan artistik baru, berbagi inspirasi, dan menciptakan karya yang mencerminkan beragam perspektif budaya. Hal ini tidak hanya memperkaya ekspresi seni, tetapi juga memfasilitasi pertukaran ide-ide kreatif, menciptakan jembatan budaya yang kuat.

Pertukaran ahli budaya melibatkan individu yang memiliki pengetahuan mendalam tentang warisan budaya dan tradisi mereka. Dalam konteks ini, para ahli budaya dapat berbagi pengetahuan mereka dengan masyarakat penerima, membuka diskusi tentang keunikan budaya, dan membangun kesadaran akan nilai-nilai yang dipegang oleh masing-masing negara.

Secara keseluruhan, program pertukaran ini bukan hanya tentang pemindahan fisik individu, tetapi juga tentang pertukaran ide, gagasan, dan nilai-nilai budaya. Hal ini dapat menciptakan ikatan yang erat antara dua negara, meningkatkan pemahaman saling, serta membangun fondasi yang kuat untuk kerja sama dalam berbagai aspek kehidupan internasional. Dengan demikian, program pertukaran menjadi salah satu instrumen efektif dalam diplomasi budaya, menciptakan kesempatan berharga untuk membangun kedekatan antara komunitas global.

#### 6. Konsultasi Diplomatik

Konsultasi berkala antara kedua negara adalah langkah penting dalam memelihara hubungan diplomatik yang efektif dan memastikan bahwa keduanya memiliki pemahaman yang sejalan mengenai perkembangan terkini dan isu-isu global. Pertemuan rutin semacam ini memberikan platform bagi pejabat pemerintah dari kedua negara untuk saling berbagi informasi, analisis, dan pandangan terkait dengan berbagai isu yang dapat mempengaruhi keamanan dan kestabilan dunia.

Pada konsultasi ini, pejabat pemerintah dapat membahas perkembangan politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan global yang mungkin memiliki

dampak signifikan terhadap kedua negara. Dialog ini memungkinkan terbentuknya pemahaman bersama tentang langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi tantangan bersama, serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh kedua negara sejalan dengan tujuan-tujuan bersama.

Konsultasi berkala juga menciptakan kesempatan untuk merinci strategi dan pendekatan yang diterapkan oleh masing-masing negara dalam menghadapi isu-isu global. Melalui pertukaran pandangan ini, mungkin ditemukan solusi bersama atau koordinasi tindakan untuk mencapai hasil yang lebih efektif dalam mengatasi tantangan bersama.

Selain itu, pertemuan rutin semacam ini dapat memperkuat komunikasi dan kepercayaan antara kedua negara. Memahami pandangan dan kebijakan satu sama lain dapat membantu mencegah miskomunikasi dan konflik yang mungkin timbul akibat perbedaan pendapat atau interpretasi. Dengan demikian, konsultasi berkala menjadi alat efektif dalam membangun dasar yang kuat untuk kerjasama dan diplomasi yang saling menguntungkan.

Dengan melakukan konsultasi secara rutin, kedua negara dapat membangun hubungan yang lebih solid, meningkatkan koordinasi kebijakan, dan merespons dinamika global dengan lebih baik. Sebagai hasilnya, upaya bersama dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan bersama dan mencapai tujuan bersama dalam konteks dinamika politik dan perkembangan global yang terus berubah.

#### 8. Kerjasama Keamanan

Kesepakatan terkait keamanan, seperti pertahanan bersama atau kerjasama dalam penanggulangan terorisme, menciptakan landasan yang kokoh untuk melindungi kedua negara dari ancaman keamanan global. Kesepakatan semacam ini mencerminkan komitmen bersama untuk menjaga stabilitas dan keamanan di tingkat nasional dan internasional.

Pertahanan bersama merupakan bentuk kerjasama keamanan yang erat antara dua negara. Dalam kerangka ini, kedua pihak berkomitmen untuk saling mendukung dalam hal pertahanan dan keamanan, serta bekerja sama dalam pengembangan teknologi militer, pelatihan militer bersama, dan

pertukaran intelijen. Kesepakatan pertahanan bersama memperkuat ketahanan kedua negara dan dapat membentuk front yang lebih solid dalam menghadapi potensi ancaman bersama.

Kerjasama dalam penanggulangan terorisme adalah aspek krusial dari kesepakatan keamanan. Kedua negara dapat saling berbagi intelijen, berkoordinasi dalam investigasi, dan mengembangkan strategi bersama untuk mencegah serta menanggulangi ancaman terorisme. Melalui kerjasama ini, keduanya dapat meningkatkan kemampuan dalam mendeteksi, mencegah, dan menanggapi serangan terorisme, menciptakan lapisan pertahanan yang lebih kuat terhadap ancaman global.

Kesepakatan terkait keamanan juga dapat mencakup aspek nonmiliter, seperti penanggulangan ancaman siber dan kejahatan lintas batas. Kedua negara dapat bersinergi dalam membangun kapasitas dan keahlian untuk melindungi sistem informasi, infrastruktur kritis, dan melawan kejahatan siber yang mungkin merugikan kedua belah pihak.

Dengan terbentuknya kesepakatan terkait keamanan, kedua negara memperkuat hubungan strategis mereka, meningkatkan kapasitas pertahanan, dan merespons tantangan keamanan bersama. Kesepakatan ini tidak hanya menciptakan keseimbangan keamanan di tingkat regional atau global tetapi juga mencerminkan tekad bersama untuk memelihara perdamaian dan stabilitas di dunia yang terus berubah.

#### 9. Kerjasama Ekonomi

Perjanjian perdagangan bebas atau perjanjian investasi yang menguntungkan kedua pihak merupakan instrumen kunci dalam menggalakkan kerja sama ekonomi antarnegara. Kesepakatan semacam ini bertujuan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, memperluas akses pasar, dan menciptakan lingkungan investasi yang stabil dan menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Perjanjian perdagangan bebas melibatkan penghapusan atau pengurangan tarif impor dan hambatan perdagangan lainnya antara kedua negara. Dengan demikian, menciptakan jalur yang lebih efisien untuk pertukaran barang dan jasa, meningkatkan daya saing produk, serta memberikan manfaat ekonomi

bagi produsen dan konsumen di kedua pihak. Selain itu, perjanjian semacam ini dapat mencakup regulasi dan standar yang disepakati bersama, menciptakan lingkungan bisnis yang lebih terbuka dan dapat diprediksi.

Sementara itu, perjanjian investasi bertujuan untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi asing dan memfasilitasi aliran modal di antara kedua negara. Dengan memberikan perlindungan hukum terhadap investor, perjanjian investasi dapat meningkatkan kepercayaan dan minat untuk berinvestasi di negara mitra. Hal ini tidak hanya memberikan manfaat bagi perusahaan asing, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembentukan lapangan kerja di negara tuan rumah.

Kesepakatan semacam ini juga dapat mencakup kerjasama dalam bidang-bidang terkait, seperti hak kekayaan intelektual, standar lingkungan, dan ketenagakerjaan. Dengan demikian, perjanjian perdagangan bebas atau investasi memberikan kerangka kerja yang komprehensif, mengatur dan merinci berbagai aspek dari hubungan ekonomi antara dua negara.

Dalam keseluruhan, perjanjian perdagangan bebas atau perjanjian investasi yang saling menguntungkan dapat menjadi katalisator untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, dan mempererat hubungan ekonomi antara negara-negara yang bersangkutan. Keberlanjutan kerjasama ini menciptakan hubungan yang lebih erat dan saling menguntungkan di tingkat ekonomi global.

Kerjasama International terdiri dari beberapa jenis salah satunya yaitu Kerjasama Bilateral. Kerjasama Bilateral yang terdiri dari dua negara terbentuk dalam hubungan diplomatik, ekonomi (perdagangan), politik, pendidikan dan kebudayaan (Hamilton & Langhorne, 1995). Sebagian negara sudah melakukan kerjasama bilateral yaitu Indonesia. Indonesia banyak melakukan kerjasama bilateral seperti Indonesia dengan Jerman, Indonesia dengan China, dan Indonesia dengan Singapura.

Posisi geografis yang strategis di wilayah Asia Tenggara memberikan keunggulan bagi Indonesia dalam menjalankan kerjasama lintas bidang seperti ekonomi, politik, dan sektor pariwisata. Sebagai anggota dari organisasi regional

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), Indonesia mengacu pada pedoman anggota yang dikenal sebagai "Blueprint ASEAN" dengan tiga pilar utama. Pilar-pilar utama dalam Blueprint ASEAN mencakup aspek ekonomi, politik dan keamanan, serta dimensi sosial budaya (Yufani, 2014).

Pilar Ekonomi memiliki beberapa elemen – elemen utama yang terpadu dan terintegrasi seperti: Perdagangan Barang, Perdagangan Jasa, Lingkungan Investasi, Fasilitas Pergerakan Tenaga Kerja Terampil dan Kunjungan pelaku usaha. Pilar Ekonomi Blue-Print ASEAN menjadi salah satu faktor Indonesia melakukan Kerjasama Bilateral (Hidayat, 2008). Dalam konteks kerjasama bilateral, khususnya yang melibatkan Indonesia, Pilar Ekonomi menjadi salah satu elemen kunci yang mendorong negara ini untuk menjalankan beragam kerjasama internasional. Faktor-faktor seperti perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi, fasilitas pergerakan tenaga kerja terampil, dan kunjungan pelaku usaha menjadi bagian integral dari kerangka kerjasama bilateral, termasuk yang tercakup dalam "BluePrint ASEAN."

Dengan adanya dukungan dan integrasi pilar ekonomi dalam kerjasama bilateral, Indonesia berpeluang untuk memperluas jangkauan perdagangan, meningkatkan investasi, serta memfasilitasi mobilitas tenaga kerja terampil. Ini merupakan gambaran dari kerjasama bilateral yang menggambarkan bahwasanya semua ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat posisi Indonesia dalam kancah ekonomi global.

#### **2.2.5. *Win-Win Solution***

Konsep solusi saling menguntungkan atau win-win solution mencakup pandangan dan sikap yang selalu mencari keuntungan bersama dalam setiap interaksi manusia. Win-win solution merujuk pada penyelesaian yang memberikan keuntungan dan kepuasan bagi semua pihak yang terlibat. Dengan pendekatan win-win, setiap pihak merasa puas dengan keputusan yang diambil. Perspektif win-win memandang kehidupan sebagai kolaborasi daripada sebagai arena persaingan.

Dalam konsep win-win solution, hidup dilihat sebagai sebuah kerja sama. Meskipun demikian, kerja sama ini umumnya membutuhkan keberadaan musuh bersama atau ancaman bersama. Oleh karena itu, untuk menjaga keberlanjutan

kehidupan manusia di Bumi, peradaban-peradaban besar perlu menentukan dan menghadapi musuh bersama.

Para peneliti perdamaian mengusulkan bahwa musuh bersama yang dihadapi manusia melibatkan isu-isu seperti kemiskinan, kebodohan, wabah penyakit, dan kerusakan lingkungan. Dengan bersatu melawan tantangan-tantangan ini, peradaban-peradaban besar dapat bekerja sama, dan setiap pihak melihat satu sama lain sebagai rekan bukan musuh.

Namun, keberadaan musuh bersama saja tidak cukup tanpa adanya kesadaran akan persamaan dasar atau common denominator. Persyaratan ini mirip dengan persyaratan dalam demokrasi, di mana setiap pihak tidak dapat merealisasikan seluruh keinginannya. Sebaliknya, masing-masing pihak hanya dapat mencapai sebagian dari keinginan mereka. (Madjid, 1992).

Di samping itu, yang menjadi syarat win-win solution juga adalah pandangan unity of mankind, yang berarti pandangan bahwa pada hakikatnya manusia adalah satu. Pandangan ini bermakna bahwa manusia dari latar belakang apapun memiliki derajat yang sama. Karena itu tak perlu ada praktek eksploitatif satu umat atas umat yang lain (Sobarna, 2002).

David Augusburger menyatakan bahwa prinsip dasar win win-win solution di antaranya: (1) Rasa hormat; (2) Keberanian; (3) Kemuliaan; dan (4) Kemauan memaafkan. Nilai-nilai ini telah dipraktikkan dalam penyelesaian konflik. Tujuan penerapan nilai ini ialah untuk menjaga kehormatan dan mencegah rasa malu (Mulyasa, 2005).

Banyaknya pihak yang terlibat dalam konflik umumnya membuat mereka merasa bahwa konflik tersebut dapat merugikan harga diri mereka. Penyelesaian melalui pendekatan win-win solution telah membimbing para pihak yang berselisih menuju kehidupan yang lebih seimbang dan memastikan keberlanjutan nilai-nilai kebersamaan. Pendekatan penyelesaian konflik ini diakui karena sangat menghargai prinsip kebersamaan serta tidak melanggar atau menindas hak individu.

Win-win solution menjadi salah satu strategi penyelesaian konflik personal di dalam konteks organisasi. Pendekatan ini dianggap sangat humanis karena melibatkan semua pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan untuk membentuk hubungan komunitas dan interaksi yang dapat memberikan

penghargaan kepada semua pihak yang terlibat, memberikan rasa aman dari ancaman, dan menciptakan lingkungan yang kondusif. Dengan demikian, para pihak memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi penyelesaian konflik. (Rusdiana, 2015).

Secara umum, win-win solution merupakan kerangka berfikir yang menghasilkan keuntungan bersama dalam setiap interaksi manusia. istilah ini dikemukakan oleh Stephen R. Covey dalam buku yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan judul Tujuh Kebiasaan OrangOrang Efektif (Sobarna, 2002). Win-win solution ini dapat dimaknai sebagai samasama menang, tidak ada seseorang yang dirugikan di atas kemenangan pihak yang lain (Sari, 2017).

Kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Jerman dalam pengadaan senjata militer sebagai upaya modernisasi alutsista merupakan fenomena yang menarik untuk diteliti. Dalam konteks hubungan bilateral, Indonesia dan Jerman telah menjalin kerjasama sejak tahun 1952 dan terus berkembang hingga saat ini. Hubungan ini melibatkan berbagai sektor, termasuk politik, ekonomi, perdagangan, investasi, sosial budaya, dan pendidikan. Salah satu sektor penting yang menjadi fokus kerjasama adalah pertahanan, di mana Indonesia berupaya meningkatkan kemampuan alutsista guna menjaga kedaulatan dan keutuhan negara.

Sebelum menjalin kerja sama dengan Jerman, Indonesia telah menjajaki kemungkinan pembelian alutsista dari Belanda. Namun, kendala politis dengan DPR Belanda menghambat proses tersebut. Pihak Belanda menolak penjualan senjata ke Indonesia karena situasi hak asasi manusia yang masih kritis di negara ini. Sebagai alternatif, Indonesia mengalihkan perhatiannya ke Jerman. Kerja sama ini mencapai puncaknya pada November 2012, ketika Kementerian Pertahanan Indonesia menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Rheinmetall AG, perusahaan pertahanan asal Jerman.

Pentingnya modernisasi alutsista bagi Indonesia tidak hanya terkait dengan kemampuan berperang, tetapi juga dalam menjaga posisi Indonesia di dunia internasional agar tidak mudah diganggu oleh negara dan kekuatan lain. Dalam konteks ini, kekuatan militer suatu negara menjadi penentu dalam mempertahankan kedaulatannya. Selain dari jumlah personel yang besar, kekuatan militer suatu

negara bergantung pada alutsista yang dimiliki serta kemampuan dalam menggunakannya. Oleh karena itu, modernisasi alutsista menjadi penting dalam menyelenggarakan pertahanan negara dengan baik.

Dalam konteks geopolitik dan keamanan, kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Jerman memiliki dampak strategis. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan perbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga memiliki tantangan keamanan yang kompleks. Keberadaan Tiongkok sebagai kekuatan besar di kawasan Indo-Pasifik menimbulkan kekhawatiran di banyak negara, termasuk Indonesia. Dalam menjaga stabilitas keamanan Indo-Pasifik, Indonesia membutuhkan dukungan dan kerja sama dengan negara lain, termasuk Jerman, dalam modernisasi alutsista.

Kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Jerman juga menjadi sarana untuk mengatasi keterbatasan kemampuan teknologi alutsista Indonesia. Dalam kurun waktu 2000-2011, kondisi alutsista Indonesia jauh tertinggal dibandingkan dengan negara lain. Sebagian besar alutsista TNI berusia lebih dari 20 tahun dengan sisa batas pakai yang terbatas. Dalam mengatasi kendala ini, kerja sama dengan Jerman dalam pengadaan senjata militer menjadi langkah yang diambil oleh Indonesia.

Dalam melakukan kerja sama pertahanan, Indonesia dan Jerman berusaha mencapai solusi yang saling menguntungkan (*win-win solution*). Indonesia memperoleh teknologi dan senjata militer terkini dari Jerman, sementara Jerman memperoleh manfaat ekonomi dari penjualan senjata tersebut. Keuntungan bagi Indonesia adalah meningkatkan kemampuan pertahanan negara, memperkuat kedaulatan dan keutuhan wilayah. Sementara itu, Jerman memperoleh keuntungan ekonomi melalui penjualan senjata dan memperluas pasar alutsista internasionalnya. Kerja sama ini juga mencerminkan komitmen bersama dalam menciptakan stabilitas dan keamanan bersama di kawasan Indo-Pasifik.

Dengan demikian, kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Jerman dalam pengadaan senjata militer sebagai modernisasi alutsista tidak hanya memberikan keuntungan strategis bagi kedua negara, tetapi juga mencerminkan pendekatan *win-win solution* dalam hubungan bilateral. Modernisasi alutsista

melalui kerja sama ini akan meningkatkan kemampuan pertahanan Indonesia dan membantu menjaga kedaulatan negara serta stabilitas keamanan di kawasan.

### **2.3 Asumsi Penelitian**

Setiap pemimpin memiliki gaya kepemimpinannya sendiri, melihat dari sudut pandang, faktor atau *background* pendidikan dan lingkungan pemimpinpun mempengaruhi arah kebijakan yang akan dibuat. Sebelum kebijakan pertahanan yang diterapkan oleh Jokowi, kebijakan pertahanan dari masa sebelum Orde Baru dan setelah Orde Baru mengalami beberapa perubahan, namun tidak berubah total sepenuhnya (Mietzner, 2006). Hal tersebut pula terlihat pada masa kepemimpinan Presiden sebelumnya, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono, dalam pembaharuan alutsista SBY merujuk pada standar minimum yang telah ditentukan dalam pelaksanaannya atau yang lebih sering kita dengar dengan *Neoralisme* (Perwita, 2005).

Sehingga peneliti menaruh asumsi bahwa kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan Jerman akan memaksimalkan modernisasi alutsista dari berbagai aspek lebih dari senjata, seperti tank, jet dan kebutuhan lainnya untuk memenuhi syarat yang MEF tetapkan.

## 2.4 Kerangka Analisis

